



RENCANA KERJA BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025.

Rencana Kerja disusun masih berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Rencana Strategi BNN RI 2020-2024 karena Renstra BNN RI untuk tahun 2025-2029 belum disahkan. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN RI.

Palangka Raya, 21 Januari 2025
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. Joko Setiono, SH., SIK., M.Hum.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba semakin bertambah dan sudah merambah di semua pelosok desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Sebagai perpanjangan tangan dari BNN RI, BNN Provinsi Kalimantan Tengah mengusung lima strategi utama BNN dalam memberantas narkoba, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan, penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, dan pendekatan ikonik dan tematik. Dengan semakin kuatnya kapasitas di lima hal tersebut diharapkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia dapat semakin efektif.

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN bersama BRIN tahun 2023, angka prevalensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 1,95 % tahun 2021 menjadi 1,73% tahun 2023. Prevalensi 1,73 artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terdapat 173 orang terpapar narkoba dalam kurun 12 bulan terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa. Adapun Jenis Narkoba yang paling banyak dipakai yaitu : Ganja dan Shabu.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program P4GN secara optimal sampai ke seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Dengan didukung oleh *stakeholder* dan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah yakni Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Polda, Korem, Kejaksaan, Kemenkumham, Pengadilan, Binda, instansi terkait, swasta dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2024 telah terbentuk 1 (satu) lagi BNNK baru yaitu di

Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga saat ini terdapat 3 (tiga) BNNK di wilayah Kalimantan Tengah, yakni BNN Kota Palangka Raya, BNN Kabupaten Kotawaringin Barat dan BNN Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan Perda tentang P4GN telah diterbitkan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan. Dengan adanya Perda tersebut dan penambahan BNNK di Kotawaringin Timur, kinerja BNN dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat meningkat sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mulai tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan rehabilitasi rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang secara sukarela (*voluntary*) dengan jumlah 6 orang klien dan telah menyelesaikan program layanan rehabilitasi rawat inap. Walaupun baru dapat melayani 6 (enam) orang dalam satu periode rehabilitasi.

Selain itu, pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 Milyar rupiah berupa hibah dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing sebesar Rp. 1 Milyar rupiah untuk pembangunan loka rehabilitasi di Kalteng. Dimana akan dimasukkan dalam Renstra BNN RI Tahun 2025-2030 dalam hal penambahan Loka Rehabilitasi BNN.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 BNN Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan kondisi kerawanan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, serta berbagai permasalahan terkini yang dihadapi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

2. Kondisi Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2024

Penetapan Kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 menetapkan sebanyak Sasaran yang terbagi dalam **13 (tiga belas) sasaran kegiatan** dan terdiri dari **18 (delapan belas) Indikator Kinerja**. Berikut evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2024. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya :

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi dengan **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten**; meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten**; meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah Provinsi **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten** dan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator kinerja yakni jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi waspada dengan **target sebanyak 1 kawasan dan capaian 1 kawasan** dan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **target sebesar 2,5 dan capaian 2,89**.

Bidang Rehabilitasi memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup dengan **target 68% dan capaian 79,5%**; meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan satu indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan **target sebanyak 10 orang dan capaian sebanyak 10 orang**; meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi dengan **target sebanyak 1 lembaga dan capaian 1 lembaga** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional dengan **target**

sebanyak 6 unit dan capaian 6 unit; dan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target indeks sebesar 3,60 dan capaian 3,70.**

Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan **target sebanyak 7 berkas perkara dan capaian 16 berkas perkara** dan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dengan **target sebesar 100 indeks dan capaian 100 indeks** dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dengan **target sebesar 100 indeks dan capaian 100 indeks.**

Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu: meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target sebesar 86 indeks dan capaian 99,98** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan **Nilai Kinerja Anggaran dengan target sebanyak 2 kabupaten/kota dan capaian 2 kabupaten/kota;** meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target sebesar 97,96 indeks dan capaian 99,95** dan indikator kinerja jumlah **BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA dengan target sebanyak 2 kabupaten/kota dan capaian 1 kabupaten/kota;** dan meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan satu indikator kinerja yakni nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal dengan nilai dengan **target sebesar 85 indeks dan capaian 85.**

Berikut tabel realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024 :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5	2,89	115,6%
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup.	68 %	79,5%	116,91%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional.	6 Unit	6 Unit	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN.	3,60 Indeks	3,70 Indeks	102,77%
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana yang P-21	7 Berkas Perkara	16 Berkas Perkara	228,57%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100	100%
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100	100%
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	99,98 Indeks	116,25%
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	2 BNN Kabupaten/ Kota	100%
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,96 Indeks	99,95 Indeks	102,03%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	1 BNN Kabupaten/ Kota	50%
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	85 Indeks	85 Indeks	100%

Terdapat 1 (satu) target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yang tidak tercapai, namun ada juga beberapa yang melampaui target. Penentuan target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 memperhatikan beberapa hal di antaranya :

- 1) Capaian target kinerja terakhir yang dievaluasi (tahun 2024).
- 2) Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024.
- 3) Dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

3. Identifikasi Potensi dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Narkoba

Pelaksanaan program P4GN di BNN Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, baik di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota maupun SDM pendukung di stakeholder mitra kerja BNN di daerah masih kurang terlatih untuk beberapa layanan di daerah, terutama pada layanan rehabilitasi. Sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program rehabilitasi di daerah.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah, seperti: kendaraan operasional, belum terpenuhinya sarana dan prasarana gedung layanan rehabilitasi rawat inap serta fasilitas layanan rehabilitasi rawat jalan yang tersedia belum dapat dikatakan lengkap, juga fasilitas IT yang belum memadai terutama di Bidang Pemberantasan.
3. Terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahguna narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi sesuai hasil assesment termasuk yang sudah menjalani TAT sehingga lapas/rutan *over capacity*. Selain itu belum tersedianya anggaran untuk pengantaran pecandu dan/atau korban penyalahguna yang sudah *inchrach* ke balai rehabilitasi di luar Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu (orang tua pecandu baru akan bertindak jika anaknya telah menunjukkan hal yang serius, misalnya telah mengalami gejala gangguan mental dan overdosis serta kriminal).
5. Baru terbentuk 3 (tiga) BNN Kabupaten/Kota dari 14 (empat belas) kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pelaksanaan P4GN belum maksimal untuk menjangkau seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah.
6. BNN Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat melaksanakan program P4GN secara maksimal sampai ke seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Tengah mengingat topografi wilayahnya yang sangat luas, keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, keterbatasan sarana prasarana, dan belum terbentuknya BNN Kabupaten/Kota pada 14 (empat belas) kabupaten.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

1. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Operasional

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Lima strategi utama BNN dalam memberantas narkoba, yaitu

- 1) Penguatan kolaborasi;
- 2) Penguatan intelijen;
- 3) Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan;
- 4) Penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, dan
- 5) Pendekatan ikonik dan tematik.

Dengan semakin kuatnya kapasitas di lima hal tersebut diharapkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia dapat semakin efektif:

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi permintaan narkoba dengan melakukan penyidikan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Meyakinkan pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi;
- 3) Menangkap pengedar;
- 4) Membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam menjalankan fungsi tersebut, telah menjangkau **464.418 orang**, terjadi peningkatan sebesar 14,21% dibanding tahun sebelumnya.

Pengukuran ketahanan keluarga anti narkoba (Dektara) di kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nilai indeks sebesar 90,92 dengan klasifikasi sangat tinggi. Artinya adalah ketahanan keluarga di kedua kota/kabupaten tersebut untuk menolak narkoba sangat tinggi. Melihat dari nilai indeks ketahanan diri remaja anti narkoba dan ketahanan keluarga anti narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dapat menjadi modal yang cukup baik untuk mendukung terciptanya Provinsi Kalimantan Tengah Bersinar (bersih narkoba).

Hasil positif tersebut dapat terwujud berkat kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. BNN Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya menduplikasi kegiatan serupa dengan mengajak stakeholder terkait, terutama pemerintah desa, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya desa (dana desa).

Pada tahun 2024 ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran membentuk 7 Desa Bersinar (Bersih Narkoba) baru, sehingga total desa bersinar yang telah dibentuk oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran berjumlah 28, dan terdapat 25 desa/ kelurahan yang dibentuk secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten/ kota. Sehingga total keseluruhan desa/kelurahan bersinar di Kalteng berjumlah 53 desa/kelurahan.

Disamping itu, pada tahun 2024 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga telah membentuk 27 (Dua Puluh Tujuh) Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga total sekolah bersinar sebanyak 44 (Empat Puluh Empat). Sekolah bersinar merupakan wujud komitmen pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pendidikan.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga membentuk Perusahaan Bersinar sebanyak 4 (empat) perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot project yang nantinya dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk bersih dari narkoba.

Guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan P4GN, BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melatih **180** orang penggiat P4GN, yang berasal dari Lingkungan Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Para penggiat P4GN tersebut juga telah melaksanakan Deteksi Dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine narkoba secara mandiri sebanyak **2.873** orang di 15 Instansi dan perusahaan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, setiap

institusi, dunia usaha dan masyarakat di Kalimantan Tengah dapat melaksanakan P4GN secara mandiri.

Sedangkan untuk gambaran ketanggapan kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba masyarakat yang diukur melalui indeks Kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba (IKOTAN) dengan memperhatikan 5 aspek yaitu aspek Ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum. Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Indeks Kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba (Ikotan) sebesar **3,25** dengan kategori Sangat Tanggap.

B. Fungsi Rehabilitasi

Dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 54 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Saat ini di wilayah Kalimantan Tengah terdapat 16 lembaga (15 Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah/LRIP dan 1 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat/LRKM) yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi.

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2024 jumlah pecandu/penyalahguna narkoba yang direhabilitasi sebanyak **3.344** orang terdiri dari sebanyak 2.251 orang (67%) rawat jalan dan 1093 orang (33%) rawat inap.

Tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran merehabilitasi 124 orang klien, terdiri dari 106 orang (85%) rawat jalan, 12 orang (10%) di rujuk dan 6 orang rawat inap (5%). Bila dibuat data terpilah maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 110 orang (89%) sedangkan perempuan sebanyak 14 orang (11%);
2. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu shabu sebanyak 95 orang (76%) dan paling sedikit menggunakan inx sebanyak 5 orang (4%);
3. Umur paling muda yang mengakses layanan rehabilitasi di berumur 14 tahun, sedangkan yang tertua berumur 49 tahun.
4. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, yang paling banyak tamat SMA 72 orang (58%) dan yang paling sedikit tidak tamat SD sebanyak 5 orang (4%);

5. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 73 orang (59%);
6. Berdasarkan domisili, masyarakat dari 13 kabupaten/kota telah mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

Klien dengan domisili paling jauh yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah dari Kab. Seruyan sebanyak 2 orang klien.

BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah membentuk sebanyak 14 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan jumlah Agen Pemulihan (AP) yang dilatih sebanyak 90 orang.

Layanan rehabilitasi rawat jalan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat baik yaitu dengan nilai 3,70.

Pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) kurang dari 30 menit merupakan terobosan Bidang Rehabilitasi, tahun 2024 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran telah menerbitkan sebanyak 1.291 SKHPN. dari hasil pemeriksaan didapat 1.270 orang negatif dan 21 orang positif.

Untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, BNN Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini RSUD, serta lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) dalam mendirikan tempat rehabilitasi di kota/kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. dari hasil kerjasama tersebut saat ini telah diresmikan 3 tempat rehabilitasi LRIP dan 1 LRKM.

Tahun 2024 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran melaksanakan program pascarehabilitasi melalui pemantauan dan pendampingan pemulihan terhadap 83 klien, dengan hasil adanya peningkatan kualitas hidup sebesar 73,5%, khususnya pada domain fisik, psikologi dan lingkungan.

Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia penyelenggara layanan rehabilitasi, Pada tahun 2024 BNNP Kalimantan Tengah telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap petugas Agen pemulihan sebanyak 30

orang yang berasal dari 6 unit IBM yang terbentuk dari wilayah BNNP Kalimantan Tengah, BNN Kota Palangka Raya dan BNN Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mulai tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan rehabilitasi rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang secara sukarela (*voluntary*) dengan jumlah 6 orang klien dan telah menyelesaikan program layanan rehabilitasi rawat inap. Walaupun baru dapat melayani 6 (enam) orang dalam satu periode rehabilitasi.

Selain itu, pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15 Milyar rupiah berupa hibah dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing sebesar Rp. 1 Milyar rupiah untuk pembangunan loka rehabilitasi di Kalteng. Dimana akan dimasukkan dalam Renstra BNN RI Tahun 2025-2030 dalam hal penambahan Loka Rehabilitasi BNN.

C. Bidang Pemberantasan

Sepanjang tahun 2024, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengungkap 12 (dua belas) kasus tindak pidana narkoba dengan 23 (dua puluh tiga) orang tersangka dimana 8 (delapan) kasus dengan 16 (enam belas) orang tersangka diantaranya 2 (dua) orang narapidana sudah dilakukan pemberkasan dan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, sedangkan 4 (empat) kasus dengan 7 (tujuh) orang tersangka saat ini sedang dilakukan pengembangan jaringan. Dari 12 Laporan Kasus Narkoba yang berhasil diungkap, 7 (tujuh) diantaranya merupakan jaringan peredaran narkoba antar provinsi. BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama BNN RI juga berhasil menangkap 2 orang DPO kasus yang menjadi perhatian masyarakat yaitu menangkap DPO Kasus Narkoba Kampung Puntun a.n. Salihin alias Saleh dan DPO Kasus 2,4 Kilogram shabu di Sampit a.n. Achmadi. Untuk terpidana Salihin saat ini sudah dilimpahkan ke Lapas Nusa Kambangan dan dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat TPPU BNN RI.

Adapun barang bukti narkoba yang berhasil disita sebanyak **1.216,57 (Seribu Dua Ratus Enam Belas Koma Lima Puluh Tujuh) gram sabu, 848,79 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram ganja dan 2 (Dua) butir ekstasi**. Barang bukti lainnya adalah 5 (lima) unit kendaraan roda dua, 4 (Empat) unit kendaraan roda empat, 22 (Dua puluh dua) buah handphone dan uang tunai Rp.28.415.000.- (*Dua Puluh Delapan Juta Empat*

Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

BNN Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat bekerja sendiri dalam menuntaskan permasalahan narkoba yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, oleh sebab itu diperlukan strategi penguatan kolaborasi serta partisipasi dari masyarakat. BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran telah berkolaborasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

1. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba bersama Polda Kalteng dan Jajaran, Kemenkumham Kalteng (Lapas), Bea Cukai Palangka Raya, Angkasa Pura Bandara Cilik Riwut Palangka Raya dan Pelindo Sampit.
2. Razia di beberapa Tempat Hiburan Malam di Sampit, razia di Lapas dan Rutan Palangka Raya serta razia di kawasan rawan Kampung Puntun bersama instansi terkait.
3. Sebagai anggota tim pengawasan orang asing (TIMPORA) dan Anggota Komite Keamanan Bandara.
4. Pengawasan pintu-pintu masuk bekerjasama dengan pengelola Pelabuhan dan Bandara serta perusahaan transportasi.

Berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya menurunkan angka permintaan narkoba, salah satunya adalah dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pada tahun 2024 jumlah kasus narkoba yang masuk dalam proses assesmen yaitu sebanyak 26 klien TAT.

Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan asesmen terpadu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah rekomendasi tempat layanan rehabilitasi. Dengan terbentuknya Balai Rehabilitasi Adhyaksa di Kabupaten Katingan, Kapuas, Gunung Mas dan Kotawaringin Timur hasil kolaborasi antara Kejaksaan, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemda setempat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengimplementasikan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* bagi penyalah guna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan BNN Kota Palangka Raya, BNN Kabupaten Kotawaringin Barat dan usulan dari Bidang dan Bagian di BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana kerja Tahun 2025 berisikan :

- Target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah akumulasi target seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.
- Pendanaan pada rencana kerja merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah.
- Rencana kerja dan pendanaan telah mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
- Rencana Kerja dan pendanaan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 membutuhkan masukan (input) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran Tahun 2025.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Pencapaian target kinerja memungkinkan kita mengidentifikasi sejauhmana kemampuan satker dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, terdiri dari :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi.
 - 4) Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba
 - 5) Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.
 - 6) Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
 - 7) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - 8) Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
 - 9) Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.
 - 10) Kegiatan Pengelolaan Informasi Edukasi.
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya.
 - 3) Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan

Adapun kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran untuk tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajaran Tahun 2025

NO	KODE OUTPUT	KEGIATAN	BNNP KALTENG	BNNK PALANGKA RAYA	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	TOTAL KEBUTUHAN PENDANAAN
1	5936	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	85,000,000	57,000,000	57,000,000	199,000,000
2	3247	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	75,000,000	75,000,000	75,000,000	225,000,000
3	3257	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	115,825,000	-	113,705,000	229,530,000
4	3248	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	75,000,000	75,000,000	-	150,000,000
5	3259	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	13,527,000	13,527,000	13,527,000	40,581,000
6	3260	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	239,935,000	70,810,000	95,600,000	406,345,000
7	3256	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	49,750,000	18,050,000	21,570,000	89,370,000
8	3251	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	250,000,000	-	-	250,000,000
9	5354	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	675,000,000	-	-	675,000,000
10	3258	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	144,833,000	17,420,000	18,020,000	180,273,000
11	3236	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4,146,446,000	60,680,000	73,398,000	4,280,524,000
12	3237	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	18,750,000	10,100,000	10,100,000	38,950,000
13	3238	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	34,855,000	27,515,000	34,649,000	97,019,000
14	3239	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	2,181,999,000	1,185,502,000	954,610,000	4,322,111,000
15	3979	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000
			8,115,920,000	1,615,604,000	1,472,179,000	11,203,703,000

Matriks Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah

Unit Kerja : BNN Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp. 199.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp.225.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Kabupaten/ Kota	Rp.229.530.000,-
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	2	Kawasan	Rp.150.000.000,-
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	1,77	Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	Orang	Rp.40.581.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi	1	Lembaga	Rp.406.345.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
	Komponen Masyarakat	fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi			
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	3	Unit	
7.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi	3,46	Indeks	Rp.89.370.000,-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	15	Berkas Perkara	Rp.675.000.000,-
9.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1	Peta Jaringan	Rp.250.000.000,-
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks	Rp.180.273.000,-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	Indeks	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi	Sangat Baik	Kategori	Rp.97.019.000,-
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai	2	Kabupaten/ Kota	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	3	4	5	6
			Kinerja Anggaran mencapai target			
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi	100	Indeks	Rp.8.661.225.000,-
			Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	Kabupaten/ Kota	
13.		Meningkatnya pengelolaan reformasi unit kerja vertikal.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	85,05	Indeks	Rp.11.203.703.000,-

Palangka Raya, 21 Januari 2025
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. Joko Setono, SH., SIK., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama tahun 2025. Dokumen rencana kerja ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat dioperasionalkan membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp.11.203.703.000,-

Palangka Raya, 11 Januari 2025
Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. Joko Setono, SH., SIK., M.Hum.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa/Kelurahan
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Layanan Rehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota	55 Orang
			Layanan SKHPN	350 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	11 Lembaga
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan	20 Orang
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	-	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2 laporan
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5 Berkas Perkara

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	10 Orang
			Layanan asesmen terpadu pelaku tindak pidana narkoba	15 Orang
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi 2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi 2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan